

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut Siti Rahmi (2021:1), akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dengan pencatatan transaksi yang disertai dengan bukti transaksi sehingga pada akhirnya akan memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Akuntansi adalah suatu proses yang meliputi kegiatan pencatatan, pengelompokan dalam satuan uang tertentu dan kemudian melaporkan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan standar tertentu untuk pengambilan keputusan yang efektif (Anna Marina, dkk 2017:5).

Menurut Hantono dan Namira Ufrida Rahmi (2018:2), akuntansi adalah:

“...suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut”.

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dari kegiatan pencatatan,

penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi, untuk menghasilkan informasi bagi pihak yang membutuhkan dalam pengambilan keputusan.

### 2.1.1.2 Fungsi Akuntansi

Menurut Tutik Siswanti, dkk (2022:10), beberapa fungsi dari akuntansi antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Recording Report*  
*Recording report* atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke *account ledger* sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui *profit* dan *loss* dari bisnis pada akhir periode akuntansi.
2. Melindungi Properti dan Aset  
 Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu.  
 Semua disipasi tidak sah dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Itulah sebabnya sistem akuntansi dirancang untuk melindungi properti dan aset bisnis dari pemakaian yang tak sah.
3. Mengkomunikasikan Hasil  
 Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya investor, kreditur, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya.
4. *Meeting Legal*  
 Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan, seperti Pengembalian Penjualan-Pajak, Pengembalian Pendapatan Pajak, dan lain sebagainya.
5. Mengklasifikasikan  
 Selanjutnya fungsi akuntansi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat.

Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokkan jenis transaksi atau entri.

Aktivitas klasifikasi ini dilakukan pada buku yang disebut sebagai "*Ledger*"

#### 6. Membuat Ringkasan

Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut.

#### 7. Analisis dan Menafsirkan

Fungsi akuntansi yang terakhir adalah melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis.

Selain itu, hasil analisis tersebut juga digunakan untuk persiapan rencana di masa mendatang dan *framing* dari kebijakan untuk pelaksanaan rencana tersebut.

### 2.1.1.3 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Margo Saptowinarko Prasetyo dan Endang Wulandari (2020:3), bidang-bidang akuntansi antara lain:

#### 1. Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*).

Akuntansi Keuangan adalah salah satu bidang akuntansi yang memiliki tujuan untuk mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan, untuk diinformasikan kepada pihak luar perusahaan.

#### 2. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*).

Akuntansi Biaya adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk menetapkan dan mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.

#### 3. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang diperlukan untuk penetapan pajak dalam suatu perusahaan.

#### 4. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*).

Anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyusun rencana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang dengan melakukan perbandingan antara hasil operasi dengan rencana yang telah ditentukan.

5. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*).  
Pemeriksaan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan secara bebas atas data-data akuntansi dengan maksud meneliti kecermatan, kebenaran, dan Ketaatan.
6. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*).  
Akuntansi Manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk pihak manajemen perusahaan untuk mendukung operasi sehari-hari dan untuk membuat perencanaan dan kebijakan untuk masa mendatang.
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*).  
Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan yang terjadi pada badan-badan pemerintah.
8. Sistem Akuntansi (*Accounting System*).  
Sistem Akuntansi adalah akuntansi yang mengkhususkan diri pada penetapan suatu prosedur dan pengendalian data keuangan sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan baik, cepat, efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, bidang akuntansi yang digunakan oleh penulis yaitu Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*).

#### **2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan**

Menurut Rina Tjandrakirana, dkk (2021:13), Akuntansi Pajak (*Tax Accounting*) adalah bidang akuntansi yang tujuan utamanya menyiapkan laporan keuangan untuk keperluan fiscal/ perpajakan dan pengisian SPT.

Khas Sukma Mulya, dkk (2023:1), menyatakan bahwa Akuntansi Perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang diperlukan untuk penetapan pajak dalam suatu perusahaan (Margo Saptowinarko Prasetyo dan Endang Wulandari, 2020:3)

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang tujuan utamanya menyiapkan laporan keuangan untuk keperluan fiscal/ perpajakan dan pengisian SPT untuk penetapan pajak dalam suatu perusahaan.

#### **2.1.1.5 Tujuan Akuntansi Perpajakan**

Menurut Khas Sukma Mulya, dkk (2023:29), Akuntansi Pajak ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan.
2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terutang baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.
4. Memberi peluang menggunakan beberapa Keputusan Pemerintah, hanya untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
5. Sebagai dasar pertahanan Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.

#### **2.1.1.6 Prinsip Akuntansi Perpajakan**

Menurut Ahmad Faisal dan Setiadi (2021:19), Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan meliputi:

1. Pengukuran dalam mata uang  
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.
2. Kesatuan akuntansi  
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan  
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep nilai historis  
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode akuntansi  
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep taat asas  
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep Materialitas  
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep konservatisme  
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi  
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.
10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan  
Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

#### **2.1.1.7 Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan (Wastam Wahyu Hidayat, 2018:2).

Menurut Hery (2021:3), Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Kasmir (2019:7), menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **2.1.1.8 Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut Renika Hasibuan, dkk (2023:3), tujuan laporan keuangan adalah untuk:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang timbul dalam aktivitas usaha demi memperoleh laba.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan untuk mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan keuangan ketika mengestimasi potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber-sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi tentang aktivitas pembiayaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sejauh mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan.

### **2.1.1.9 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### **1. Dapat Dipahami**

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (Paragraf 25).

#### **2. Relevan**

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (Paragraf 26). Dalam relevan ada materialitas yaitu:

##### **a. Materialitas**

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakekat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Paragraf 29).

#### **3. Keandalan**

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan (Paragraf 31). Dalam laporan keuangan yang andal harus melingkupi beberapa yaitu:



a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan (Paragraf 33).

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi) (Paragraf 35).

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan (Paragraf 36).

d. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban

yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal (Paragraf 37).

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi (Paragraf 38).

**4. Dapat dibandingkan**

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda (Paragraf 39).

**2.1.1.10 Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Keuangan**

Menurut Hantono dan Namira Ufrida Rahmi (2018:6), Pemakai informasi Akuntansi atau pihak yang berkepentingan terhadap Laporan Keuangan yaitu:

1. Pihak Intern

a. Pemilik Perusahaan

Pemilik dan para calon pemilik dari suatu perusahaan adalah mereka yang menanamkan uangnya ke dalam perusahaan. Dengan informasi akuntansi, para pemilik perusahaan dapat menilai prestasi (hasil) kerja managernya, mengangkat ke level lebih tinggi atau malahan sebaliknya dan juga untuk pertimbangan apakah perusahaan menguntungkan atau tidak.

b. Manager Perusahaan

Melalui informasi akuntansi para manajer dapat mengambil keputusan tentang hasil kerjanya apakah sukses atau tidak, yang berhubungan dengan masalah kesejahteraan kerja. Dengan informasi tersebut para manajer dapat menaikkan/menurunkan dan memutasikan jabatan bawahannya. Jika perusahaan memperoleh laba maka manajer dapat merencanakan perluasan usaha perusahaan.

## 2. Pihak Ekstern

### a. Penanam Modal

Investor adalah penanam modal. Melalui informasi akuntansi, para investor dapat mengetahui keadaan suatu perusahaan, tingkat risiko dan hasil pengembangan dari setiap investasi, sehingga mereka dapat memutuskan apakah mereka harus membeli, menahan/menjual kembali investasinya. Bagi calon investor, informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan suatu perusahaan sehingga ia dapat memutuskan untuk menanamkan investasinya atau tidak.

### b. Pemberi Pinjaman

Bagi kreditur, informasi akuntansi digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan, sehingga kreditur dapat mengetahui apakah laporan keuangannya baik dan apakah perusahaan kita nantinya akan sanggup atau tidak untuk membayar pinjaman yang diberikan sehingga kreditur dapat memutuskan untuk memberi pinjaman atau tidak.

### c. Pemasok/Pengirim Barang (Supplier)

Informasi akuntansi bagi supplier adalah ia akan menghentikan pengiriman barangnya karena khawatir perusahaan tidak sanggup melunasi utangnya dan sebaliknya bila keadaan usaha perusahaan maju maka pengiriman barang akan ditambah.

### d. Pemerintah

Bagi pemerintah gunanya untuk mengenakan pajak penghasilan terhadap suatu perusahaan.

#### **2.1.1.11 Jenis-jenis Laporan Keuangan**

Menurut Hery (2021:3), urutan laporan keuangan berdasarkan proses penyajiannya adalah sebagai berikut:

#### 1. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Merupakan laporan yang sistematis tentang pendapatan dan beban perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini pada akhirnya memuat informasi mengenai hasil kinerja manajemen atau hasil kegiatan operasional perusahaan, yaitu laba atau rugi bersih yang merupakan hasil dari pendapatan dan keuntungan dikurangi dengan beban dan kerugian.

2. Laporan Ekuitas Pemilik (*Statement of Owner's Equity*)  
Adalah sebuah laporan yang menyajikan ikhtisar perubahan dalam ekuitas pemilik suatu perusahaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan ini sering dinamakan sebagai laporan perubahan modal.
3. Neraca (*Balance Sheet*)  
Adalah sebuah laporan yang sistematis tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas perusahaan per tanggal tertentu. Tujuan dari laporan ini tidak lain adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan.
4. Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*)  
Adalah sebuah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar secara terperinci dari masing-masing aktivitas, yaitu mulai dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, sampai pada aktivitas pendanaan/pembiayaan untuk satu periode waktu tertentu. Laporan arus kas menunjukkan besarnya kenaikan/penurunan bersih kas dari seluruh aktivitas selama periode berjalan serta saldo kas yang dimiliki perusahaan sampai dengan akhir periode.

Laporan keuangan biasanya dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan (*Notes to the Financial Statements*). Catatan ini merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen laporan keuangan. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

#### **2.1.1.12 Unsur-unsur Laporan Keuangan**

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

### **1. Laporan Posisi Keuangan**

#### **A. Aktiva/Aset**

Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di

masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49) Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:38), Aset merupakan sumber ekonomis dari suatu usaha yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi usaha tersebut dimasa yang akan datang. Contohnya Kas, Kewajiban, Persediaan, Perlengkapan Kantor, Tanah dan Bangunan.

Aset dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu aset lancar dan aset tidak lancar (aset tetap).

- **Aset Lancar**, adalah kas dan aset-aset lain yang dapat ditukarkan menjadi kas (uang) dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan.

Adapun kelompok aset lancar adalah sebagai berikut:

- a. **Kas** merupakan saldo uang tunai yang ada di perusahaan. Bank adalah saldo rekening koran perusahaan di bank. Aset ini merupakan aset paling lancar bagi perusahaan karena dapat langsung digunakan untuk segala macam transaksi.
- b. **Surat-surat berharga (*marketable securities*)** adalah saham, obligasi, dan surat-surat berharga lain yang dimiliki perusahaan dengan maksud untuk memutarakan kelebihan uang tunai dan tidak dimaksudkan untuk investasi jangka panjang.
- c. **Piutang Dagang** adalah hak klaim yang dimiliki perusahaan terhadap seseorang atau perusahaan lain. Pada saat jatuh tempo, apabila piutang dilunasi, perusahaan akan memperoleh uang tunai, aset lain atau jasa. Piutang dagang adalah piutang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (penjualan kredit).
- d. **Piutang wesel** atau sering disebut dengan wesel tagih pada hakikatnya merupakan piutang juga, tetapi dalam hal ini debitur memberikan janji tertulis bahwa ia akan membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu.
- e. **Persediaan** merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Dalam perusahaan dagang jenis persediaan yang selama ini dikenal adalah persediaan barang dagang.
- f. **Pembayaran di muka** dapat digolongkan menjadi uang muka (*advances*) dan beban di bayar di muka (*prepaid expenses*). Uang muka adalah pembayaran di muka yang nanti akan diperhitungkan pada waktu perolehan suatu aset, sedang beban dibayar di muka, seperti namanya sudah menyebutkan, adalah pembayaran di muka untuk beban. Contoh dari uang muka adalah uang muka pembelian persediaan dan uang muka

pembelian aset tetap. Contoh beban di bayar di muka adalah sewa di bayar di muka, asuransi dibayar di muka, pembayaran di muka pajak penghasilan, perlengkapan, dan lain-lain.

- **Aset Tetap**, merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya.

Aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi:

a. **Tanah**

b. **Peralatan dan Mesin**

c. **Gedung dan Bangunan**

- **Aset Tak Berwujud** (*intangible asset*) adalah aset tak lancar (*noncurrent asset*) dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak di cakup secara terpisah dalam klasifikasi aset yang lain. Salah satu karakteristik aset tak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya dikemudian hari. Dalam banyak kasus, nilai aset tak berwujud berkisar antara nihil sampai dengan jumlah yang besar. Aset tak berwujud antara lain dapat berbentuk hak paten, hak cipta, *franchise*, merk dagang dan *goodwill*.

a. **Hak Paten** adalah hak tunggal yang diberikan oleh Pemerintah melalui Direktorat Patent kepada seseorang atau badan untuk menggunakan penemuan baru. Contoh: penemuan produk, formula, dan sebagainya

b. **Hak cipta** (*copy right*) adalah hak tunggal yang diberikan oleh Pemerintah kepada seseorang atau badan untuk memperbanyak dan menjual hasil karya seni atau karya intelektual. Contoh: menulis buku, mencipta lagu dan sebagainya

c. **Franchise** adalah hak tunggal atau istimewa yang diperoleh suatu perusahaan dari Pemerintah, orang, atau perusahaan lain untuk mengkomersialkan produk, proses, atau resep tertentu. Contoh: Franchise dari Kentucky Fried Chicken, dan sebagainya

d. **Hak merk** adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau badan untuk menggunakan cap, nama, logo, lambang, atau merk usaha.

e. **Goodwill** adalah suatu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan, karena adanya keistimewaan tertentu. Contoh: letak lokasi yang strategis, produk dengan merk yang terkenal, personalia yang profesional, dan sebagainya.

## B. Kewajiban (*Liabilities*).

Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49).

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:45), Liabilitas adalah utang perusahaan masa kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Sama halnya dengan aset, hutang juga memiliki dua kelompok utama. Kedua jenis hutang tersebut adalah hutang lancar dan hutang jangka panjang. Berikut akan diuraikan satu persatu mengenai definisi dan pengertian masing-masing hutang tersebut.

- **Hutang Lancar**, adalah kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan normal perusahaan. Satu siklus normal adalah periode waktu yang diperlukan dari sejak kas dibayarkan untuk pembelian barang atau jasa yang di butuhkan untuk produksi sampai dengan kas dari hasil penjualan produk perusahaan di terima. Hutang yang digolongkan sebagai hutang lancar adalah hutang yang akan di lunasi dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi perusahaan. Hutang lancar juga dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dengan kekayaan perusahaan yang diklasifikasi sebagai aset lancar atau dengan menimbulkan hutang lancar baru
  - a. **Hutang dagang** merupakan piutang dagang, yaitu utang yang berasal dari kegiatan utama perusahaan (pembelian kredit barang dan jasa). Akun ini biasanya dilampiri dengan daftar utang dagang yang memuat rincian menurut nama kreditur.
  - b. **Hutang wesel** atau sering disebut dengan wesel bayar merupakan kebalikan dari piutang wesel. Dalam hal mengeluarkan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tertentu.
  - c. **Hutang bank** merupakan kewajiban jangka pendek atau jangka panjang kepada bank atau lembaga keuangan yang disebabkan oleh pinjaman yang diterima oleh perusahaan
  - d. **Hutang gaji, bunga, dan lain-lain** Hutang yang termasuk dalam golongan ini merupakan beban-beban yang terjadi tetapi belum saatnya dibayar. Kadang-kadang hutang semacam ini disebut dengan beban masih harus dibayar (*accrued liabilities*).

- e. **Hutang dividen** tunai merupakan sejumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang saham karena adanya distribusi yang telah diumumkan oleh dewan komisaris.
- **Hutang Jangka Panjang** adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Hutang yang digolongkan sebagai hutang jangka panjang adalah hutang yang akan di lunasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau melebihi siklus operasi perusahaan. Termasuk contoh hutang jangka panjang antara lain hutang obligasi, hutang wesel jangka panjang, hutang hipotek, hutang pensiun, dan hutang sewa guna. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing rekening yang ada pada hutang jangka panjang.
  - a. **Hutang Obligasi** adalah surat pernyataan hutang perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut, pengertian lain obligasi adalah hutang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya disertai bunga (penerbit obligasi) dan pihak yang menerima pembayaran atau piutang yang dimilikinya beserta bunga (pemegang obligasi) yang pada umumnya tanpa menjaminkan suatu aset.
  - b. **Hutang Wesel Jangka Panjang** Wesel atau juga dikenal dengan nama *Bank draft* atau *Banker's draft* adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit *draft* tersebut kepada pihak lainnya (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang tertentu atau orang yang ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. *Bank draft* ini adalah merupakan cek namun sumber dana pembayarannya adalah berasal dari rekening bank penerbit bukan dari rekening nasabah perorangan.
  - c. **Hutang hipotik** adalah pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan.
  - d. **Hutang pensiun** adalah perjanjian dimana perusahaan akan memberikan pembayaran kepada karyawan setelah mereka berhenti bekerja untuk jasa yang telah diberikan pada masa kerja.



- e. **Hutang Sewa Guna usaha** adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama.

### C. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban (PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49).

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:47), Ekuitas pemilik adalah hak pemegang saham atas suatu aset yang tersisa dalam perusahaan.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua karakteristik ekuitas, yaitu:

1. Ekuitas sama dengan aset neto, yaitu selisih antara aset perusahaan dengan hutang perusahaan;
2. Ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aset neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik (pendapatan dan biaya) maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik.

### 2. Laporan Laba Rugi

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:23), isi laporan laba-rugi terdiri dari:

- Penjualan Bersih (*Net Sales*), hasil penjualan/penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan return penjualan
- Harga pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*), Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
  - a. Bahan Baku (*Raw Material*)
  - b. Upah Langsung (*Direct Labour*)
  - c. Biaya pabrik (Biaya overhead)
- Laba kotor (*Gross profit*), Adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan
- Biaya Usaha (*Operating Expenses*), Umumnya biaya usaha terdiri dari Biaya penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang dll). Biaya umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak

berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telpon, biaya gaji bagian administrasi dll).

- Laba Usaha (*Operating Profit*), Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- Laba sebelum Bunga dan pajak (*Earning Before Interest Tax*), Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- Laba Bersih sebelum Pajak (Penghasilan) adalah jumlah laba sebelum dibebani dengan pajak atas laba tersebut. Pajak atas laba ini dikenal dengan istilah pajak penghasilan (Renika Hasibuan, dkk, 2022:29)
- Laba Bersih setelah pajak (*Earning After Tax*), Laba setelah pajak (*earnings after tax*) merupakan laba yang diperoleh setelah dikurangkan dengan pajak. Ini disebut juga dengan *net income* (laba bersih), atau net profit yang diterima oleh perusahaan. Sebaliknya, apabila perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi bersih (*net loss*) (Fahmi 2015:99)
- Laba ditahan (*Retained Earning*), Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.

### 3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Siti Rahmi (2021:30), laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi selama periode tertentu. Misalnya satu bulan atau satu tahun. Penambahan dalam ekuitas berasal dari penambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik dan laba bersih dari kegiatan usaha perusahaan. Pengurangan ekuitas berasal dari pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang biasa disebut dengan prive dan kerugian bersih dari kegiatan usaha perusahaan.

### 4. Laporan Arus Kas

Menurut Hendra Harmain, dkk (2019:24), secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas utama tersebut adalah:

- **Aktivitas Operasi**, yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya suatu perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha dimasukkan dalam kelompok ini. Karena itu, dalam aktivitas ini tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan

dari sumber di luar usaha utama, pembelian barang dagang, pembayaran beban tenaga kerja, dan pembayaran beban-beban usaha lainnya.

Menurut Kuswandi (2008:141), Arus Kas Bersih = Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar.

Menurut Nurliah (2023:142), Arus kas masuk lainnya yang berasal dari kegiatan operasional, misalnya:

- a. Penerimaan dari langganan.
- b. Penerimaan dari piutang bunga.
- c. Penerimaan dividen.
- d. Penerimaan *refund* dari *supplier*.

Arus Kas keluar misalnya berasal dari:

- a. Kas yang di bayarkan untuk pembelian barang dan jasa yang akan dijual.
  - b. Bunga yang di bayar atas utang perusahaan.
  - c. Pembayaran pajak penghasilan.
  - d. Pembayaran gaji.
- **Aktivitas Investasi**, adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan *financial*. Contoh investasi adalah pembelian berupa *asset financial* seperti obligasi, saham, asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau property seperti rumah atau tanah. Lebih luasnya investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha misalnya pembelian mesin. Kesamaan dari semua investasi di atas adalah harapan untuk memperoleh keuntungan (*gain*) di kemudian hari.
  - **Aktivitas Pembiayaan**, yaitu metode yang di gunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal yaitu investor ekuitas (pemilik atau pemegang saham) dan kreditor (pemberi pinjaman). Keputusan tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi, setelah mempertimbangkan pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dan risiko.

##### 5. Catatan atas Laporan Keuangan

adalah informasi tambahan yang harus di berikan menyangkut berbagai hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan, dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. (Hendra Harmain, dkk 2019:27)

### 2.1.1.13 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Menurut Pohan (2015:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/*stakeholders*, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk kepentingan perhitungan pajak (Taufan Maulamin dan Sartono, 2021:6).

Menurut Siti Resmi (2019:376), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. Perbedaan prinsip akuntansi  
Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
  - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
  - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.

- c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
    - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
    - b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun (*declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
    - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
  - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:
    - a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
    - b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
    - c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha.
    - d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
    - e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.
    - f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
  - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
    - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
    - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
    - c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
    - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
    - e) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidik tindak pidana, dan lain-lain).
    - f) Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi.
  - c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
    - a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
    - b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam

- perhitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
- c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
  - d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
    - a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
    - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
    - c) Pajak penghasilan.
    - d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundang-undangan perpajakan.
    - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
    - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).
- a. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:
    - Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
    - Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

- Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expense*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- b. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Menurut Suandy (2016:96), perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Menurut Pohan (2015:322), beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. Beda waktu terdiri dari
- Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal.
  - Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal.
  - Penyisihan kerugian piutang (*allowance for bad debts*).
  - Penyisihan kerugian persediaan.
  - Penyisihan pesangon.
  - Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga
  - Penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

#### **2.1.1.14 Rekonsiliasi Fiskal**

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis,



laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak) (Siti Resmi, 2019:375).

Menurut Bambang Kesit (2001) dalam Siti Resmi (2019:376), beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya, meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan.
2. Laporan keuangan fiskal ekstrakomtabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan, di luar laporan keuangan bisnis. Perusahaan bebas menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi bisnis. Laporan keuangan fiskal disusun secara terpisah di luar pembukuan (ekstrakomtabel) melalui penyesuaian atau proses rekonsiliasi.
3. Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya, pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis, tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis maka diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan”.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan

menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut (Siti Resmi, 2019:376).

Menurut Pohan (2015:318), rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal).

Menurut Siti Resmi (2019:380), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.”

Menurut Pohan (2015:318), fiskus menggunakan istilah Penyesuaian Fiskal Positif dan Penyesuaian Fiskal Negatif (yang sama pengertiannya dengan Koreksi

Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif) berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No.KEP.141/PJ./2004:

- a. “Penyesuaian fiskal positif  
Penyesuaian fiskal positif adalah penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena perhitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari perhitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
- b. Penyesuaian Fiskal Negatif  
Penyesuaian Fiskal Negatif adalah penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dana atau menambah biaya-biaya komersial.”

Menurut Pohan (2015:319), ada dua macam koreksi fiskal yaitu:

1. “Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal positif antara lain:
  - a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan.
  - b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
  - c. Biaya yang diakui lebih kecil.
  - d. Biaya yang timbul dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
  - e. Biaya yang timbul dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
2. Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial.

Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan adanya koreksi fiskal negatif antara lain:

- a. Biaya yang diakui lebih besar.
- b. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.”

### **2.1.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Scott (2015) dalam Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022) menjelaskan bahwa teori agensi merangkum bagaimana hubungan prinsipal dan agen, dimana prinsipal berwenang untuk memberikan tugas kepada agen semata-mata demi mewujudkan keinginan prinsipal, sementara agen adalah pihak yang mengerjakan segala keperluannya. Chariri dan Ghazali (2007) dalam Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022), menjelaskan bahwa dalam teori agensi terdapat tiga hubungan, yaitu: hubungan agen dengan pemegang saham, kreditur dan pemerintah.

Dalam perspektif teori agensi dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara *agent* (perusahaan) dengan *principal* (pemerintah). *Agency theory* menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kontrol yang rendah atas perusahaan untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan *agency theory*, pemerintah menginginkan pajak yang di bayarkan setara dengan laba yang dimiliki namun perusahaan berupaya untuk membayarkan beban pajaknya seminimal mungkin dengan cara melakukan penghindaran pajak (Tim Penulis Prodi Akuntansi UMM, 2022:92).

### 2.1.3 Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:114) sebagai berikut:

*“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the asset being traded that another type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry”.*

Menurut Scott (2009:13), asimetri informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Adverse Selection*  
*Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.*
2. *Moral Hazard*  
*Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.*

Manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sedangkan kepentingan fiskus (*prinsipal*) berbanding balik dengan keinginan agent. Agen dapat melakukan asimetri informasi dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan guna menghindari pajak agar pajak yang dibayar dapat rendah (Thalia Renata Octavia dan Dian Purnama Sari, 2022)

## 2.1.4 *Financial Distress*

### 2.1.4.1 Definisi *Financial Distress*

Kebangkrutan atau kegagalan keuangan perusahaan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan atau kesulitan likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan (Rudianto 2013:251).

Plat dan Plat dalam Irham Fahmi (2015:158) mendefinisikan *Financial Distress* sebagai:

“... tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuiditasi. *Financial Distress* dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori solvabilitas”.

*Financial Distress* adalah kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional dan kewajibannya karena keuangan yang tidak mencukupi. Keadaan ini apabila tidak diatasi akan berujung pada kebangkrutan (Nur Ika Effendi, dkk, 2022:172)

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* adalah kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional dan kewajiban keuangannya terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk kewajiban dalam kategori

solvabilitas pada saat jatuh tempo. Keadaan ini apabila tidak diatasi akan berujung pada kebangkrutan

#### 2.1.4.2 Kategori *Financial Distress*

Menurut Irham Fahmi (2015:159), untuk persoalan *financial distress* secara kajian umum ada 4 (empat) kategori penggolongan yang bisa kita buat, yaitu:

- a. **Pertama**, *financial distress* kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi *bankruptcy* (pailit). Dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
- b. **Kedua**, *financial distress* kategori B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (*infeasible*) lagi untuk dipertahankan.
- c. **Ketiga**, *financial distress* kategori C atau sedang, dan ini dianggap perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan Tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. Namun di sini perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk target dalam menggenjot perolehan laba kembali. Dimana salah satu tugas manajer baru tersebut adalah jika perolehan laba telah kembali diperoleh maka jika perusahaan pernah melakukan keputusan penjualan saham, maka memungkinkan dana keuntungan yang diperoleh tersebut dialokasikan Sebagian untuk membeli kembali saham yang telah dijual kepada public atau yang dikenal dengan istilah *stock repurchase* atau *buy back*.

Keputusan untuk membeli kembali saham yang sudah dijual ke pasaran mengandung berbagai arti bagi suatu perusahaan, antara lain:

- 1) Perusahaan memiliki kembali saham yang sudah diedarkan di pasaran;
  - 2) Perusahaan telah membei sinyal positif ke pasaran, bahwa memiliki kemampuan finansial yang cukup;
  - 3) Diharapkan dengan membeli saham, *Earning pershare* akan mengalami kenaikan; dan
  - 4) Dengan terjadinya peningkatan *Earning pershare* (EPS) diharapkan *market price pershare* juga akan mengalami kenaikan.
- d. Keempat, *financial distress* kategori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan mengeluarkan *financial reserve* (cadangan keuangan) yang dimiliki, atau mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan biasanya jika ini terjadi pada anak perusahaan (*subsidiaries company*) maka itu bisa diselesaikan secara cepat tanpa harus ada penanganan serius dari pihak manajemen kantor pusat (*head office management*)

### 2.1.4.3 Manfaat Informasi Kebangkrutan

Menurut Rudianto (2013:253), Informasi kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak berikut ini:

#### 1. Manajemen

Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya kebangkrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan dihilangkan atau diminimalkan. Langkah pencegahan kebangkrutan yang merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan bisa berupa merger atau restrukturisasi keuangan.

#### 2. Pemberi Pinjaman (Kreditor)

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai kreditor untuk mengambil keputusan mengenai diberikan-tidaknya pinjaman kepada perusahaan tersebut.



Pada langkah berikutnya, informasi tersebut berguna untuk memonitor pinjaman yang telah diberikan.

### 3. **Investor**

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah badan usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, maka perusahaan calon investor itu dapat memutuskan membeli atau tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut.

### 4. **Pemerintah**

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah bertanggung jawab mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal.

### 5. **Akuntan Publik**

Akuntan publik perlu menilai potensi keberlangsungan hidup badan usaha yang sedang diauditnya, karena akuntan akan menilai kemampuan *going concern* perusahaan tersebut.

#### 2.1.4.4 **Penyebab *Financial Distress***

Menurut Rudianto (2013:252), secara umum, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Karena itu, penting sekali memahami berbagai jenis kegagalan yang mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan. Terdapat tiga jenis kegagalan dalam perusahaan, yaitu:

- a. Perusahaan yang menghadapi *technically insolvent*, jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo tetapi nilai aset perusahaan lebih tinggi daripada utangnya.
- b. Perusahaan yang menghadapi *legally insolvent*, jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan.
- c. Perusahaan yang mengalami kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit.

Secara umum, penyebab utama kegagalan sebuah perusahaan adalah manajemen yang kurang kompeten. Tetapi penyebab umum kegagalan tersebut

dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang saling terkait satu dengan lainnya. Pada prinsipnya, penyebab kegagalan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

### 1. Faktor Internal

Kurang kompetennya manajemen perusahaan akan berpengaruh terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Kesalahan dalam mengambil keputusan akibat kurang kompetennya manajemen yang dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan, meliputi faktor keuangan maupun nonkeuangan.

Kesalahan pengelolaan di bidang keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Adanya utang yang terlalu besar sehingga memberikan beban tetap yang berat bagi perusahaan.
- b. Adanya “*current liabilities*” yang terlalu besar di atas “*current assets*”.
- c. Lambatnya penagihan piutang atau banyaknya “*bad debts*” (piutang tak tertagih).
- d. Kesalahan dalam “*dividend policy*”.
- e. Tidak cukupnya dana-dana penyusutan.

Kesalahan pengelolaan di bidang nonkeuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi:

- a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan.
- b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan.
- c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan.
- d. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan.
- e. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan.
- f. Kesalahan dalam kebijakan pembelian.
- g. Kesalahan dalam kebijakan produksi.
- h. Kesalahan dalam kebijakan pemasaran.
- i. Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan.

### 2. Faktor Eksternal

Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah perusahaan. Penyebab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau berasal dari luar perusahaan dan yang berada di luar kekuasaan atau kendali pimpinan perusahaan atau badan usaha, yaitu:

- a. Kondisi perekonomian secara makro, baik domestik maupun internasional.
- b. Adanya persaingan yang ketat.
- c. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkannya.
- d. Turunnya harga-harga dan sebagainya.

## 2.1.4.5 Metode Pengukuran *Financial Distress*

### 2.1.4.5.1 Analisis Altman *Z-Score*

Rudianto (2013:254) menyatakan bahwa, Analisis *Z-Score* adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Itu berarti, dengan metode *Z-Score* dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.

Rumus *Z-Score* pertama dihasilkan Altman pada tahun 1986. Rumus ini dihasilkan dari penelitian atas berbagai perusahaan manufaktur di Amerika Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. Karena itu, rumus tersebut lebih cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-perusahaan manufaktur yang *go public*. Rumus pertama tersebut adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,2X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,6X_4 + 1,0X_5$$

Keterangan:

$X_1$  = Modal Kerja dibagi dengan Total Aset

$X_2$  = Laba Ditahan dibagi dengan Total Aset

$X_3$  = EBIT dibagi dengan Total Aset

$X_4$  = Nilai Pasar Saham dibagi dengan Total Utang

$X_5$  = Penjualan dibagi dengan Total Aset

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari 5 unsur yang berbeda, di mana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda, maka sangat penting untuk memahami makna dari setiap unsur tersebut. Definisi dari diskriminasi Z (zeta) adalah;

a. Rasio  $X_1$  (Modal Kerja : Total Aset)

Mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid bersih dengan total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset lancar – utang lancar). Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan turun lebih cepat ketimbang total aset sehingga menyebabkan rasio ini turun. Rasio ini dapat dicari dengan rumus:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

b. Rasio  $X_2$  (Laba Ditahan : Total Aset)

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas yang mendeteksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran *operating assets* sebagai ukuran efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi.

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

c. Rasio  $X_3$  (EBIT : Total Aset)

Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas aset, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (*Earning Before Interest and Tax*) tahunan perusahaan dengan total aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya pencapaian laba

perusahaan terutama dalam rangka memenuhi kewajiban bunga para investor.

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

d. Rasio  $X_4$  (Nilai Saham : Total Utang)

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (*DER = Debt To Equity Ratio*) yang lebih terkenal. Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan dikalikan dengan pasar saham per lembar sahamnya (jumlah lembar saham x harga pasar saham per lembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasi lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri.

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Pasar Saham}}{\text{Total Utang}}$$

e. Rasio  $X_5$  (Penjualan : Total Aset)

Rasio ini mengukur kemampuan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya.

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Nadiyah Vardah Varassah (2018), Setelah didapatkan hasil dari perhitungan menggunakan model persamaan Altman *Z-Score*, maka akan disesuaikan dengan kriteria penilaian atau titik *cut off* sebagai berikut:

1.  $Z \geq 2,99$  = Perusahaan tidak mengalami *Financial Distress*

2.  $1,81 \leq Z < 2,99$  = Perusahaan berada di zona rawan (*Grey Area*) dan

perusahaan harus waspada.

3.  $Z < 1,81$  = Perusahaan mengalami *Financial Distress*

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak *go public*. Karena itu, rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* yang kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak *go public*, sebagai berikut:

$$Z = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Keterangan:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

$$X_s = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus *Z-Score* tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan manufaktur *non go public*. Untuk itu Altman kembali melakukan penelitian di Mexico (negara berkembang) dengan harapan bahwa rumus *Z-Score* dapat digunakan dalam perusahaan *go public* maupun *non go public*.

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:

1.  $Z > 2,9$  = Zona Aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi)
2.  $1,23 < Z < 2,9$  = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.
3.  $Z < 1,23$  = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi)

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan, Altman tidak berhenti. Altman melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan selain perusahaan manufaktur, baik yang *go public* maupun yang tidak. Rumus *Z-Score* terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai

jenis bidang usaha perusahaan, baik yang *go public* maupun yang tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia.

Pada model terakhir ini rasio *sales to total asset* dihilangkan dengan harapan dampak industri – dalam pengertian ukuran perusahaan terkait dengan aset atau penjualan – dapat dihilangkan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_3 = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aset}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Buku Ekuitas}}{\text{Nilai Buku Utang}}$$

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* tersebut akan menghasilkan skor yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan:



1.  $Z > 2,6$  = Zona Aman (Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi)
2.  $1,1 < Z < 2,6$  = Zona Abu-abu (Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*). Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.
3.  $Z < 1,1$  = Zona Berbahaya (Perusahaan dalam kondisi bangkrut (mengalami kesulitan keuangan dan risiko yang tinggi)

#### 2.1.4.5.2 Analisis Springate Score

Menurut Rudianto (2013:262), Springate Score adalah metode untuk memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan yang umum dengan diberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya. Jadi, dengan metode Springate Score dapat diprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan.

Untuk menentukan rasio-rasio mana saja yang dapat mendeteksi kemungkinan kebangkrutan, Springate menggunakan MDA untuk memilih 4 rasio dari 19 rasio keuangan yang populer dalam literatur-literatur, yang mampu membedakan dengan baik antara sinyal usaha yang pailit dan tidak pailit.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Springate Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut:

$$S = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$$

Keterangan:

$X_1 = \text{Modal Kerja/Total Aset}$

$X_2 = \text{EBIT/Total Aset}$

$X_3 = \text{EBT/Utang Lancar}$

$X_4 = \text{Penjualan/Total Aset}$

1.  $S > 0,862$  = Perusahaan Sehat
2.  $S < 0,862$  = Perusahaan Potensial Bangkrut

#### 2.1.4.5.3 Analisis Zmijewski

Menurut Rudianto (2013:264), Zmijewski Score adalah metode untuk memprediksi keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan mengkombinasikan beberapa rasio keuangan umum yang memberikan bobot yang berbeda satu dengan lainnya.

Zmijewski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas perusahaan untuk model prediksi kebangkrutan yang dibangunnya. Model ini menekankan pada jumlah utang sebagai komponen yang paling berpengaruh terhadap kebangkrutan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Zmijewski Score untuk berbagai jenis perusahaan, seperti terlihat berikut:

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 - 0,004X_3$$

Keterangan :

$X_1 = \text{Net Income/Total Assets}$

$$X_2 = \text{Total Liabilities/Total Asset}$$

$$X_3 = \text{Current Assets/Current Liabilities}$$

Salah satu komponen yang menentukan *Financial Distress* yang terdapat dalam rumus Altman Z-Score pertama menurut Rudianto (2013:254) adalah Modal Kerja dan Nilai Pasar Saham. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan diatas.

#### 1. Modal Kerja

Menurut Agung Anggoro, dkk (2023:121), Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan membayar utang jangka pendek. Modal kerja juga dapat digunakan untuk menjaga likuiditas perusahaan dan membiayai investasi jangka pendek. Modal kerja merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa banyak dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai operasi harian dan memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek. Modal kerja dihitung dengan mengurangi aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin besar modal kerja, semakin baik likuiditas perusahaan dan semakin kuat kemampuannya untuk mengatasi darurat keuangan. Oleh karena itu, modal kerja harus dipertahankan pada tingkat yang memadai.

#### 2. Nilai Pasar Saham

Menurut Ari Agung Nugroho, dkk (2022:84), berikut ini beberapa nilai yang berhubungan dengan saham yaitu:

##### 1. Nilai Buku (*Book Value*)

Nilai buku (*book value*) merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai buku ditentukan berdasarkan akuntansi, yaitu berdasarkan total aktiva dikurangi total hutang.

##### 2. Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai Pasar (*market value*) merupakan nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar saham berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual di pasar, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran.

### 3. Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)

Nilai intrinsik dapat didefinisikan sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham, dengan kata lain nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya.

Menurut Widoatmojo (2005:54) dalam Ari Agung Nugroho, dkk (2022:81), Adapun jenis-jenis harga saham adalah sebagai berikut:

#### 1. Harga Nominal

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

#### 2. Harga Perdana

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwrite*) dan emiten. Dengan demikian akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

#### 3. Harga Pasar

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

#### 4. Harga Pembukaan

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.

#### 5. Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau yang ini terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar.

Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.

#### 6. Harga Tertinggi

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak ada pada harga yang sama.

#### 7. Harga Terendah

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.

#### 8. Harga Rata-Rata

Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah pada satu periode.

Menurut Fahmi (2015:53), ada beberapa pengertian saham adalah:

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk dijual.

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preference stock). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing- masing (Fahmi, 2015:54).

#### 1. Common Stock (saham biasa)

Common stock (saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Secara lebih tegas Skousen, Stice, dan Stice Mengatakan, "Para pemegang saham biasa merupakan para pemilik riil perusahaan (korporasi) ini: mereka memiliki hak pilih (vote) atas dewan direktur dan memiliki kepemilikan legal aktiva perusahaan setelah tuntutan (claim) semua kreditor dan para pemegang saham preferen dipenuhi."

Common stok ini memiliki beberapa jenis yaitu:

- a) Blue Chip-Stock (Saham Unggulan). Adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba,

pertumbuhan, dan management yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont merupakan contoh blue chip.

b) Growth Stock. Adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi.

c) Defensive Stock (saham-saham defensif). Adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar). Contoh perusahaan yang masuk kategori ini biasanya perusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh publik seperti perusahaan yang masuk kategori *food and beverage*, yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam dan sejenisnya.

d) Cyclical Stock. Adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik mobil dan real estate. Sebaliknya saham non siklis mencakup saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-obatan.

e) Seasonal Stock. Adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim natal.

f) Speculative Stock. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak.

## 2. Preferred Stock (saham istimewa)

Preferred Stock (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan).

Menurut Ari Agung Nugroho, dkk (2022:79), harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Investor senantiasa mengamati pergerakan harga saham selama periode tertentu yang dijadikan sampel pada saat penutupan harga pasar saham.

## **2.1.5 Konservatisme Akuntansi**

### **2.1.5.1 Definisi Konservatisme Akuntansi**

Watts (2003) dalam Enni Savitri (2016:22) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi.

Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:23) menyatakan bahwa Konservatisme akuntansi sebagai pengakuan awal biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Menurut Belkaoui (2012) dalam Renaldi Alfarasi dan Dul Muid (2022), konservatisme akuntansi merupakan sikap pesimisme umum dalam pemilihan teknik akuntansi dalam pelaporan keuangan, yaitu prinsip memilih nilai aset dan pendapatan terendah, sedangkan nilai kewajiban dan beban pelaporan tertinggi.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa konservatisme akuntansi merupakan sikap pesimisme umum dalam pemilihan teknik akuntansi dalam pelaporan keuangan, sebagai pengakuan awal biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan. Dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan yang terjadi.

### 2.1.5.2 Jenis-jenis Konservatisme Akuntansi

Menurut Subramanyam (2010:92), konservatisme dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Konservatisme Tak Bersyarat (*Unconditional Conservatism*), yaitu bentuk akuntansi konservatisme yang diaplikasikan secara konsisten dalam dewan direksi. Hal ini mengarah kepada nilai aset yang lebih rendah secara perpetual. Contoh dari konservatisme tak bersyarat adalah akuntansi untuk penelitian dan pengembangan (R&D). Beban R&D dihapuskan ketika sudah terjadi, meskipun ia mempunyai potensi ekonomis. Oleh karena itu aset bersih dari perusahaan yang melakukan R&D secara insentif akan selalu lebih rendah (*understated*).
2. Konservatisme Bersyarat (*Conditional Conservatism*), yaitu mengacu kepada pepatah lama “semua kerugian diakui secepatnya, tetapi keuntungan hanya diakui saat benar-benar terjadi”. Contoh konservatisme bersyarat adalah menurunkan nilai aset seperti PP&E atau goodwill apabila nilainya mengalami penurunan secara ekonomis, yaitu pengurangan potensi arus kasnya dikemudian hari. Sebaliknya, apabila potensi arus kasnya meningkat dikemudian hari, maka kita tidak dapat serta merta menaikkan nilainya karena laporan keuangan hanya mencerminkan kenaikan potensi arus kas selama periode secara perlahan, dan hal itu dilakukan apabila arus kas benar-benar terjadi.

Dari kedua jenis konservatisme tersebut, jenis konservatisme tak bersyaratlah yang lebih berharga bagi analis, terutama analis kredit karena ia mengkomunikasikan informasi tepat pada waktunya mengenai perubahan yang merugikan dalam situasi ekonomi perusahaan yang mendasarinya.

### 2.1.5.3 Konservatisme Akuntansi dalam PSAK

Menurut Enni Savitri (2016:25), PSAK sebagai standar pencatatan akuntansi di Indonesia menjadi pemicu timbulnya penerapan prinsip konservatisme. Pengakuan prinsip konservatisme di dalam PSAK tercermin dengan terdapatnya berbagai pilihan metode pencatatan di dalam sebuah kondisi yang sama. Hal tersebut akan mengakibatkan angka-angka yang berbeda dalam laporan keuangan yang pada



akhirnya akan menyebabkan laba yang cenderung konservatif. Beberapa pilihan metode pencatatan di dalam PSAK yang dapat menimbulkan laporan keuangan konservatif diantaranya adalah:

1. PSAK No. 14 tentang persediaan yang menyatakan bahwa perusahaan dapat mencatat biaya persediaan dengan menggunakan salah satu metode yaitu FIFO (*first in first out*) atau masuk pertama keluar pertama dan metode rata-rata tertimbang.
2. PSAK No. 16 tentang aktiva tetap dan aktiva lain-lain yang mengatur estimasi masa manfaat suatu aktiva tetap. Estimasi masa manfaat suatu aktiva didasarkan pada pertimbangan manajemen yang berasal dari pengalaman perusahaan saat menggunakan aktiva yang serupa. Estimasi masa manfaat tersebut haruslah diteliti kembali secara periodik dan jika manajemen menemukan bahwa masa manfaat suatu aktiva berbeda dari estimasi sebelumnya maka harus dilakukan penyesuaian atas beban penyusutan saat ini dan di masa yang akan datang. Standar ini memungkinkan perusahaan untuk mengubah masa manfaat aktiva yang digunakan dan dapat mendorong timbulnya laba yang konservatif.
3. PSAK No. 19 tentang aset tidak berwujud yang berkaitan dengan metode amortisasi. Dijelaskan bahwa terdapat beberapa metode amortisasi untuk mengalokasikan jumlah penyusutan suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya.
4. PSAK No. 20 tentang biaya riset dan pengembangan yang menyebutkan bahwa alokasi biaya riset dan pengembangan ditentukan dengan melihat hubungan antara biaya dan manfaat ekonomis yang diharapkan perusahaan akan diperoleh dari kegiatan riset dan pengembangan. Apabila besar kemungkinan biaya tsb akan meningkatkan manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan biaya tersebut dapat diukur secara handal, maka biaya-biaya tersebut memenuhi syarat untuk diakui sebagai aktiva.

#### **2.1.5.4 Pengukuran Konservatisme Akuntansi**

Watts (2003) dalam Enni Savitri (2016:45), membagi konservatisme menjadi 3 pengukuran, yaitu *Earning/Stock Return Relation Measure*, *Earning/Accrual*

*Measures, Net Asset Measure*. Berikut beberapa pengukuran konservatisme jika dikelompokkan sesuai dengan pendekatan Watt (2003):

### 1. *Earning/Stock Return Relation Measure*

Menurut Basu (1997) dalam Enni Savitri (2016:50), konservatisme diukur pendekatan reaksi pasar atas informasi yang diungkapkan perusahaan. Konservatisme diukur dengan cara membentuk regresi antara *return* saham terhadap laba

$$\frac{EPS_{it}}{P_{it}} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{it} + \beta_0 R_{it} + \beta_1 R_{it} DR_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

EPS<sub>it</sub> : *Earnings per share* untuk perusahaan i tahun t

P<sub>it</sub> : Harga pasar pembukaan untuk perusahaan I tahun t

R<sub>it</sub> : Return saham perusahaan i tahun t

DR<sub>it</sub> : 1 bila return pasar untuk perusahaan i pada tahun t adalah negatif dan 0 bila sebaliknya.

$\alpha_0$  : Intersep

$\alpha_1$  : Koefisien variabel dummy jenis periode

$\beta_0$  : Koefisien (slop) regresi

$\beta_1$  : Koefisien variabel interaksi return dan jenis periode

$\varepsilon_{it}$  : *Error terms*

## 2. *Earning/Accrual Measures*

Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur konservatisme akuntansi menurut Givoly dan Hayn (2000) dalam Enni Savitri (2016:52), yaitu:

$$\text{CONACC} = \frac{(\text{NIO} + \text{DEP} - \text{CFO}) \times (-1)}{\text{TA}}$$

Keterangan:

CONACC : *Earnings conservatism based on accrued items*

NIO : *Operating profit of current year*

DEP : *Depreciation of fixed assets of current year*

CFO : *Net amount of cash flow from operating activities of current year*

TA : *book value of closing total assets.*

Depresiasi dikeluarkan dari *net income* dalam perhitungan CONACC karena depresiasi merupakan alokasi biaya dari aktiva yang dimiliki perusahaan. Pada saat pembelian aset, kas yang dibayarkan termasuk dalam arus kas dari kegiatan investasi dan bukan dari kegiatan operasi. Dengan demikian alokasi biaya depresiasi yang ada dalam net income tidak berhubungan dengan kegiatan operasi dan harus dikeluarkan dari perhitungan (Enni Savitri 2016:47).

Menurut Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi (2016), ukuran konservatisme di atas harus dikali -1, sehingga semakin besar nilai positif rasio, maka semakin konservatif.

Apabila hasil bertanda positif, maka perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi. Namun bila hasil bertanda negatif, perusahaan tidak menerapkan konservatisme akuntansi (Kadek Nita Sumiari dan Dewa Gede Wirama, 2016)

1.  $CONACC > 0$  Perusahaan menerapkan Konservatisme Akuntansi
2.  $CONACC \leq 0$  Perusahaan tidak menerapkan Konservatisme Akuntansi

### 3. *Net Asset Measure*

Menurut Beaver dan Ryan (2000) dalam Enni Savitri (2016:48) perhitungan *Net Asset Measures* menggunakan proksi rasio *Market to book value ratio (market value of common equity/book value common equity)*.

Rumus untuk menghitung *market to book ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Market/Book(M/B) Ratio} = \frac{\text{Market price share of common stock}}{\text{book value per share of common stock}}$$

Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya (Enni Savitri 2016:48)

Adapun komponen untuk menentukan Konservatisme Akuntansi yang terdapat dalam rumus *Earning/Accrual Measures CONACC* menurut

Givoly dan Hayn (2000) yaitu depresiasi. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan diatas.

### 1. Depresiasi

Depresiasi adalah penurunan nilai yang terjadi secara berangsur-angsur dari waktu ke waktu. Penurunan nilai ini terjadi pada berbagai jenis barang, seperti gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan berbagai inventaris lainnya. Penyusutan suatu barang bisa berbeda-beda jenisnya tergantung jenis barang tersebut dan perawatan yang dilakukan pada barang tersebut juga. Perawatan mampu membuat penyusutan barang menjadi lebih lambat dan nilai barang masih tetap tidak mengalami penurunan yang tajam. Karena itu bagi suatu perusahaan biaya pemeliharaan menjadi lebih penting, sehingga *cost* yang dialokasikan untuk pemeliharaan barang adalah memiliki tempat khusus (Fahmi, 2015:100).

#### **Faktor yang Menentukan Beban Penyusutan**

Biaya penyusutan periodik harus merupakan hasil alokasi harga perolehan aktiva dikurangi dengan taksiran nilai sisanya kepada periode-periode di mana manfaat potensial aktiva tetap itu dikonsumsi, guna mendapatkan hasil alokasi yang sebanding dengan manfaat potensial yang dikonsumsi pada masing-masing periode. Ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan atau yang menentukan di dalam penentuan biaya penyusutan (I Nyoman Wahyu Widiana, 2023:45), yaitu berikut ini:

##### 1. Harga Perolehan (*Costs*)

Harga perolehan adalah keseluruhan pengeluaran yang layak dibebankan atau dikapitalisasikan sebagai harga perolehan. Harga perolehan inilah yang akan dialokasikan sebagai biaya penyusutan periodik. Oleh karena harga perolehan ini yang akan dialokasikan maka dalam penentuan besarnya alokasi harus dilakukan perhitungan yang teliti.

##### 2. Umur Ekonomis (*Useful-Life*)

Umur ekonomis ialah umur suatu aktiva tetap sejak siap dipergunakan sampai pada waktu aktiva tetap tersebut secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lagi untuk dipergunakan terus. Artinya, biaya yang dikeluarkan untuk penggunaan aktiva tersebut sudah melebihi atau sudah tidak seimbang lagi dengan daya guna yang dapat diberikannya. Umur ekonomis suatu aktiva tetap harus ditaksir setelah memperhatikan hal-hal berikut.

- a. Taksiran kerusakan fisik karena pemakaian.
- b. Keusangan karena waktu.

c. Hukum atau pembatasan-pembatasan lain terhadap penggunaan aktiva tetap yang bersangkutan.

### 3. Nilai Sisa atau Nilai Residu (Salvage Value)

Nilai sisa atau nilai residu ialah nilai aktiva tetap setelah habis umur ekonomisnya atau jumlah uang yang diharapkan akan diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan kelak apabila tiba saatnya harus diberhentikan dari pemakaiannya. Nilai residu aktiva tetap yang dihapuskan akan meliputi harga penjualan yang diperkirakan atau nilai pertukaran atau nilai bekas yang tak dipakai lagi atau nilai akhir (junk value) jika aktiva tetap tersebut tidak dapat digunakan, dikurangi dengan biaya-biaya dari pelaksanaan penarikan aktiva tetap tersebut, seperti biaya pembongkaran, biaya lelang, biaya pemindahan, dan lain-lain. Hasil penjualan aktiva tersebut setelah diberhentikan dari pemakaiannya sangat dipengaruhi oleh perkembangan harga dan keadaan pasar serta kebijaksanaan pemberhentian aktiva dari pemakaiannya.

### 4. Metode Penyusutan

Metode penyusutan adalah suatu cara yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap berwujud dialokasikan sebagai biaya operasional sepanjang umur aktiva. Di dalam kenyataannya, tidak semua aktiva tetap yang digunakan dalam operasi suatu perusahaan mengalami penyusutan atau penurunan nilai guna dengan cara yang sama. Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap cocok untuk diterapkan untuk jenis aktiva tertentu belum tentu akan cocok untuk diterapkan pada jenis aktiva yang lain karena perbedaan sifat dan pola penggunaan aktiva-aktiva tersebut. Metode penyusutan yang dipilih hendaknya sesuai dan menggunakan sifat dan pola penggunaan aktiva tetap yang akan di susut. Begitu pula, prinsip konsistensi harus diperhatikan dalam pemilihan metode penyusutan yang akan dipilih untuk digunakan.

### **Macam-Macam Metode Depresiasi**

Menurut I Nyoman Wahyu Widiana (2023:48), metode depresiasi merupakan suatu yang sistematis dan rasional tentang bagaimana harga perolehan aktiva tetap dialokasikan. Oleh karena itu, agar alokasi harga perolehan sebagai pengakuan biaya bisa mendekati tepat maka harus digunakan metode depresiasi yang sesuai dengan pola pemakaian aktiva tetap yang bersangkutan.

Ada beberapa metode depresiasi yang biasa digunakan dan perlu Anda ketahui (I Nyoman Wahyu Widiana, 2023:49), yaitu berikut ini.

#### 1. Depresiasi yang dihitung berdasarkan aktivitas aktiva tetap (Metode Aktivitas).

Metode Aktivitas Suatu aktiva tetap yang di depresiasi berdasarkan aktivitas penggunaannya, metodenya disebut dengan metode

aktivitas (activity method). Metode aktivitas menggunakan pendekatan pembebanan variabel dengan asumsi bahwa depresiasi merupakan fungsi dari produksi. Dalam metode aktivitas, umur ekonomis aktiva tetap diukur berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah unit produk yang mampu diberikan oleh aktiva tetap tersebut. Secara konseptual, metode ini paling mendekati ketepatan terhadap pola pemakaian aktiva tetap sehingga apabila dapat diketahui kemampuan suatu aktiva tetap dalam memberikan manfaat ekonomis selama pemakaiannya dan bisa ditentukan berapa banyak penggunaan manfaat ekonomis aktiva tetap tersebut untuk satu periode maka akan dapat ditentukan secara tepat besarnya alokasi harga perolehan aktiva tetap untuk satu periode tersebut

## 2. Metode Garis Lurus (Straight-Line Method)

Metode garis lurus dipakai untuk mendepresiasi suatu aktiva tetap apabila diperkirakan bahwa aktiva tetap tersebut memberikan manfaat ekonomis yang relatif sama besarnya untuk setiap periode selama masa penggunaannya. Umur ekonomis yang digunakan pada metode garis lurus dihitung atas dasar umur (masa pakai) aktiva tetap yang bersangkutan. Metode garis lurus ini menganggap depresiasi sebagai fungsi dari waktu

## 3. Depresiasi dengan pembebanan yang menurun.

Depresiasi Dengan Pembebanan Yang Menurun Metode depresiasi yang lazim digunakan untuk pembebanan depresiasiyang menurun ada 2, yaitu berikut ini.

### a. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of The Year's Digits Method)

Dengan menggunakan metode ini, suatu aktiva tetap di susut dengan jumlah yang semakin mengecil. Depresiasi per tahun dihitung sebesar proporsi antara Sisa Umur Penggunaannya dari Nilai Penjumlahan Umur Penggunaan Aktiva Tetap terhadap bagian harga perolehan aktiva tetap tersebut

### b. Metode persentase tetap dari nilai buku (Metode Saldo yang Menurun/Declining Balance Method)

Metode saldo yang menurun dalam metode saldo yang menurun, depresiasi suatu aktiva tetap dihitung sebesar persentase tertentu dari nilai bukunya pada awal tahun.

## 2. Amortisasi

Amortisasi adalah alokasi atas pengeluaran untuk memperoleh Aset Tetap yang tidak berwujud atau pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun (Setu Setyawan, 178:2022)

## 3. Depleksi

Selain aset tidak berwujud yang telah dibahas di atas, perusahaan juga dapat memperoleh aset untuk mengelola sumber daya alam berupa pemanfaatan atau penggalian. Contoh hak penguasaan hutan, hak untuk

menambang minyak dan gas bumi. Biaya untuk memperoleh hak tersebut setiap periode akan berkurang sebagai akibat pemanfaatan atau penggalan sumber daya. Pembebanan biaya semacam ini disebut dengan istilah deplesi. Deplesi pada dasarnya dapat disamakan dengan penyusutan pada aset tetap (Zainal Arifin, 2009:149).

## **2.1.6 Leverage**

### **2.1.6.1 Definisi Leverage**

Kasmir (2019:151) menyatakan bahwa *leverage ratio* merupakan:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).”

Menurut Hery (2021:161), rasio *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya.

Rasio solvabilitas atau *leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor (Wastam Wahyu Hidayat, 2018:46).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh



kewajibannya. Rasio ini juga memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor

#### **2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage***

Menurut Kasmir (2019:153), berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* yakni:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. Manfaat lainnya.

### 2.1.6.3 Jenis-jenis Rasio *Leverage*

Menurut Kasmir (2019:155), dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio *leverage* antara lain:

#### 1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

*Debt Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

Perusahaan akan dikatakan baik jika perusahaan itu bisa mencapai rasio hutang di bawah rata-rata industri. Apabila rasio hutang rata-rata industri sebesar 35%, maka rasio hutang dengan kurang dari 35% berarti perusahaan dikatakan baik (Kasmir, 2019:157).

#### 2. *Debt to Equity Ratio*

*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.

Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

### 3. *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

### 4. *Times Interest Earned*

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2019:160), *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*.

Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan dua cara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBIT}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

Atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

#### 5. *Fixed Charge Coverage (FCC)*

*Fixed charge coverage* atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus untuk mencari *fixed charge coverage (FCC)* adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{EBT + \text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

## **2.1.7 Tax Avoidance**

### **2.1.7.1 Definisi Pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof.Dr.H.Rochmat Soemitro SH dalam Agus Salim dan Haeruddin (2019:13), pajak adalah:

“... iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung (Rifhi Siddiq) dalam Agus Salim dan Haeruddin (2019:13).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.1.7.2 Fungsi Pajak

Menurut Agus Salim dan Haeruddin (2019:14), pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)  
Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)  
Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

### 2.1.7.3 Jenis Pajak

Menurut Agus Salim dan Haeruddin (2019:16), ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak.

#### 1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

##### a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

##### b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung

seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

## **2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut**

Berdasarkan instansi pemungutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak daerah dan pajak negara.

### **a. Pajak Daerah (Lokal)**

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya: pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan masih banyak lainnya.

### **b. Pajak Negara (Pusat)**

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti: Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya: pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lainnya.

## **3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak.**

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak objektif dan pajak subjektif. Kedua jenis pajak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Pajak Objektif**

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan masih banyak lainnya.

### **b. Pajak Subjektif**

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

### **2.1.7.4 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Agus Salim dan Haeruddin (2019:19), secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada tiga cara yaitu:

1. *Official Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah
  - a. pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak.
  - b. wajib pajak bersifat pasif, dan
  - c. hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
2. *Self Assessment System*  
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri system pemungutan pajak ini adalah:
  - a. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak,
  - b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan
  - c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
3. *Withholding Asesment System*  
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

#### **2.1.7.5 Tarif Pajak**

Menurut Dwikora Harjo (2019:39), terdapat empat jenis tarif pajak yakni:

1. Tarif Pajak Tetap  
Tarif Pajak Tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka tertentu yang tetap (sama besarnya) terhadap berapapun besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.



2. Tarif Pajak Secara Proporsional  
Tarif Pajak ini sering juga disebut sebagai Tarif Pajak Sebanding, yakni suatu tarif pajak berupa suatu persentase tertentu yang tetap terhadap berapapun besarnya jumlah dasar pengenaan pajak.
3. Tarif Pajak Secara Progresif  
Di beberapa literatur tarif pajak ini disebut juga tarif pajak meningkat, yaitu berupa tarif pajak yang nilai persentasenya akan meningkat apabila besarnya dasar pengenaan pajaknya meningkat (semakin besar). Tarif pajak Progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:
  - a) Tarif Pajak Progresif Progresif  
Kondisi dimana semakin meningkat dasar pengenaan pajaknya akan semakin meningkat persentase tarif pajaknya dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat
  - b) Tarif Pajak Progresif Tetap/Proporsional  
Tarif ini disebut pula sebagai Tarif Pajak Progresif Proporsional, dimana tarif ini mengkondisikan adanya peningkatan persentase tertentu pada nilai tarif pajaknya apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Perbedaan dengan tarif pajak progresif-progresif, pada tarif ini peningkatan persentase tarif pajaknya tetap.
  - c) Tarif Pajak Progresif Degresif  
Tarif pajak ini mengkondisikan persentase tarif pajak yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai dasar pengenaan pajaknya, namun peningkatan persentase tarif banyak yang terjadi bersifat semakin menurun.
4. Tarif Pajak Secara Degresif  
Tarif pajak ini disebut pula tarif pajak secara menurun, yakni suatu kondisi dimana persentase tarif pajak akan semakin menurun apabila nilai dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat

#### **2.1.7.6 Definisi Tax Avoidance**

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), penghindaran pajak yaitu :

*“... tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal”.*

Syafi'i dan Ali Mudhor (2022:23) menyatakan bahwa Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya wajib pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan.

*Tax Avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak secara ilegal dan bukan mengurangi kesanggupan/kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya (Chairil Anwar Pohan, 2018:12).

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak dengan memanfaatkan celah hukum.

#### **2.1.7.7 Cara Melakukan Penghindaran Pajak**

Menurut Syafi'i dan Ali Mudhor (2022:23), penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. Menahan Diri  
Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh:
  - a) Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembaka
  - b) Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut.
  - c) Sebagai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastic.
2. Pindah Lokasi  
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka.
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis  
Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.

### 2.1.7.8 Pengukuran *Tax Avoidance*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135), terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam pengukuran penghindaran pajak, yaitu:

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\textit{Worldwide total income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\textit{Worldwide current income tax expense}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\textit{Worldwide cash taxes paid}}{\textit{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>
<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\Sigma(\textit{Worldwide cash taxes paid})}{\Sigma(\textit{Worldwide total pretax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
		<i>earnings over n years</i>
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression:</i> $\text{ETR differential} * \text{Pre-tax book income} = a + b\text{Controls} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
Total BTD	$\text{Pretax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	<i>The total differences between book and taxable incomes</i>
Temporary BTD	$\text{Deferred tax expense} / \text{U.S. STR}$	
Abnormal total BTD	$\text{Residual from } \text{BTD} / \text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$	<i>A measure of unexplained</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
		<i>total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Ada berbagai macam jenis pengukuran penghindaran pajak yang telah diuraikan di atas, namun dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan untuk menghitung penghindaran pajak adalah menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) menurut Hanlon dan Heitzman (2010:135) sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Net income before tax}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Cash Tax Paid* = Pembayaran Pajak

*Net Income Before Tax* = Laba Bersih Sebelum Pajak

Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2010-2019 sebesar 25%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 25% (<25%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari atau sama dengan 25% (≥25%), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak.

Adapun menurut Undang Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 17 Ayat 1(b) tarif pajak yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2020-2022 sebesar 22%, perusahaan akan diduga melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) kurang dari 22%

(<22%) dan jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) lebih dari atau sama dengan 22% ( $\geq 22$ ), maka perusahaan diduga tidak melakukan penghindaran pajak.

### 2.1.7.9 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia tahun 2010-2019 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
  - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.
  - b. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada

- tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- c. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
  - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan.
  4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
  5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.
  6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
  7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

#### **2.1.7.10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021**

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, pada pasal 17 tarif pajak yang berlaku di Indonesia pada tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi: (2a). Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai	25% (dua puluh lima persen)



dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2a) Dihapus.

(2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:

- a. berbentuk perseroan terbuka;
- b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

(2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

3. Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4)', dihitung sebanyak jumlah hari dalam

bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk 1 (satu) tahun pajak.

6. Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
7. Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

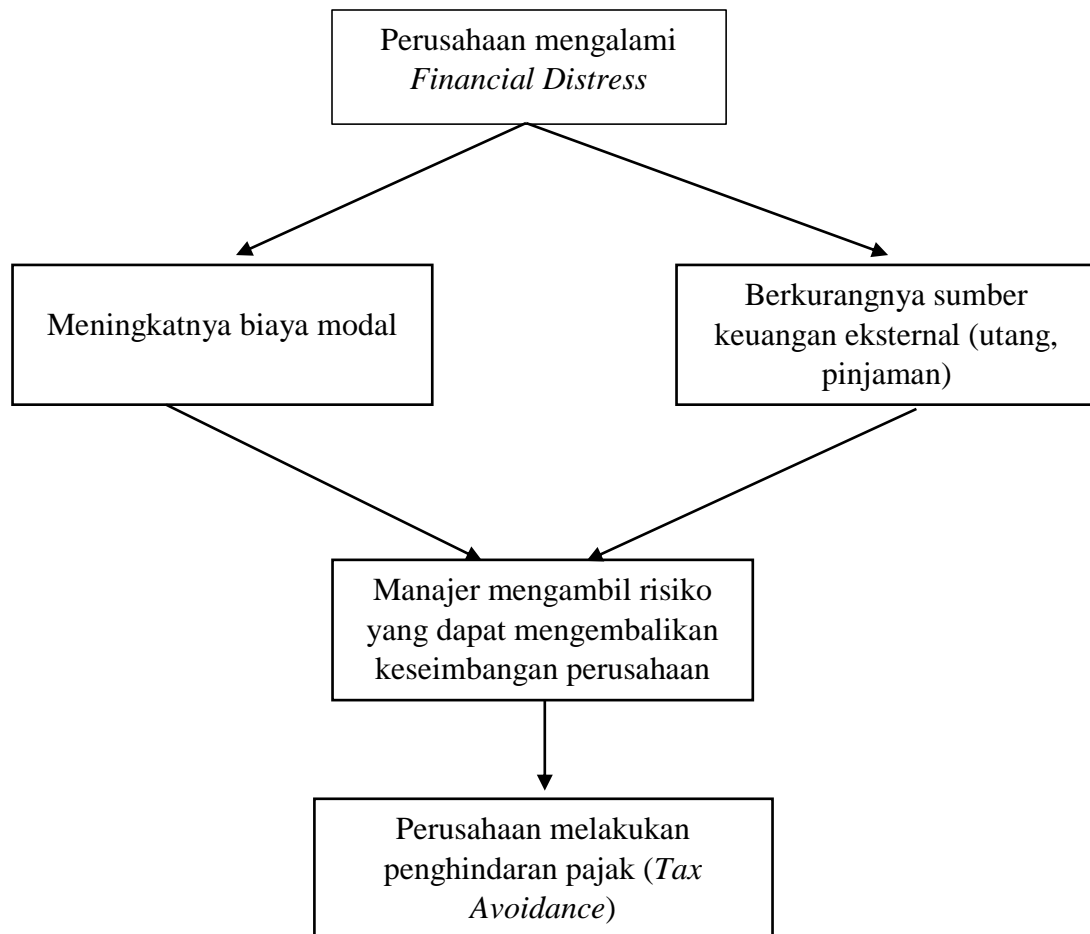
### **2.2.1 Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Richardson et al.(2015) dalam Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017), terdapat beberapa implikasi pada peraturan pajak perusahaan ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan. Sebagai contoh, meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan eksternal (utang, pinjaman) yang dihadapi perusahaan yang mengalami krisis dan secara general, keinginan dari manajer untuk mengambil risiko yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui penghindaran pajak.

Edwards et al. (2013) dalam Puspita Rani (2017), menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dihadapkan pada kondisi meningkatnya biaya modal, pengurangan akses terhadap sumber dana eksternal (khususnya hutang), penurunan rating kredit dan secara umum hal tersebut mendorong manajemen untuk mengambil risiko lebih terkait agresifitas pajak perusahaan. Pajak merupakan beban bagi perusahaan yang juga akan mengurangi kas perusahaan secara signifikan. Perusahaan yang sedang berada dalam kesulitan keuangan akan berupaya

meminimalisir beban atau pengeluaran kas perusahaan untuk mengurangi atau mengatasi permasalahan keuangan perusahaan.

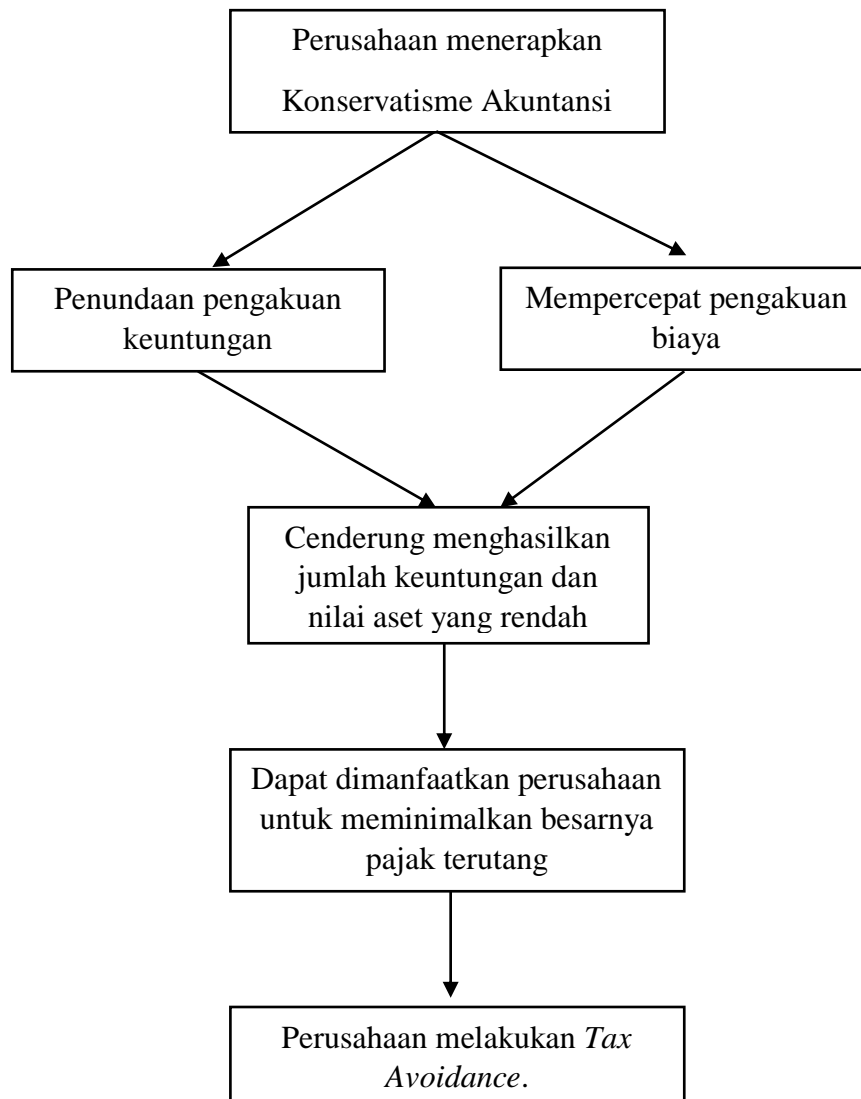
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rani Alifianti Herdian Putri dan Anis Chariri (2017), Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020), Vinny Alvionita, dkk (2021), Teddy Megido Siburian dan Harlyn L. Siagian (2021), Ida Ayu Putu Wira Yanti dan I Nyoman Putra Yasa (2022), Suhaidar, dkk (2022), dan Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*****Gambar 2.1****Kerangka Pemikiran Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance***

### **2.2.2 Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance***

Menurut Dian Puspitasari, dkk (2022), Penerapan konservatisme akuntansi dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan besarnya pajak terutang melalui penundaan pengakuan keuntungan dan mempercepat pengakuan biaya. Saputra (2017) dalam Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2021) menyatakan prinsip konservatisme adalah konsep yang mengakui beban dan kewajiban sesegera mungkin meskipun ada ketidakpastian tentang hasilnya, namun hanya mengakui pendapatan dan aset ketika sudah yakin akan diterima. Berdasarkan prinsip konservatisme tersebut, jika terdapat ketidakpastian kerugian maka harus cenderung mencatat kerugian tersebut. Jika terdapat ketidakpastian keuntungan maka tidak harus mencatat keuntungan. Dengan demikian, laporan cenderung menghasilkan jumlah keuntungan dan nilai aset yang rendah demi untuk berjaga-jaga sehingga terdapat kemungkinan indikasi pelaksanaan *Tax Avoidance*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviari (2020), Nur Amaliyah dan Cahyaningsih (2020), Vinny Alvionita, dkk (2021), Puspita Wahyu Nugraheni dan Rr. Indah Mustikawati (2021), dan Dian Puspitasari, dkk (2022) yang menyatakan bahwa Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

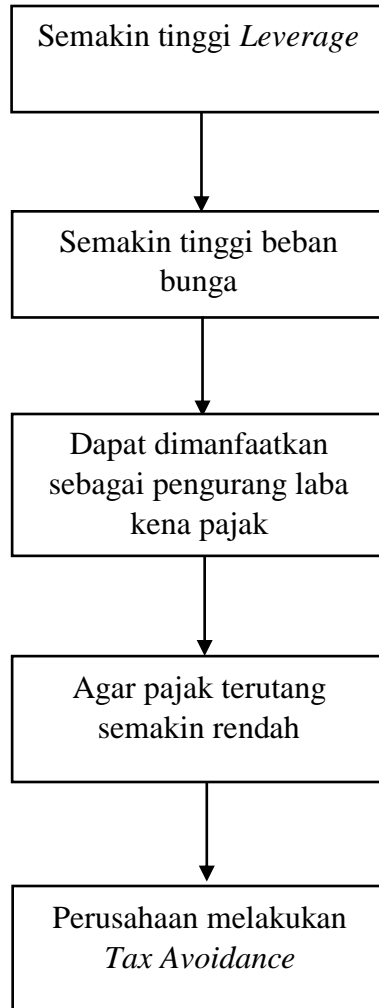
**Kerangka Pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax****Avoidance***Gambar 2.2****Kerangka Pemikiran Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance***

### 2.2.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan memiliki hutang yang tinggi sehingga mengakibatkan beban bunga dari hutang tersebut juga akan meningkat. Tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah bahkan cenderung mengarah pada tindakan *tax avoidance* (Dian Puspitasari, dkk, 2022)

Selanjutnya, pengguna utang yang berasal dari sumber dana eksternal yang berakibat munculnya biaya bunga dimana beban bunga yang muncul oleh perusahaan digunakan sebagai insentif pajak yang akan mempengaruhi laba kena pajak yang artinya semakin tinggi pengguna utang dari pihak eksternal maka semakin tinggi beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan sehingga ini mengindikasikan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Masrullah, dkk, 2018)

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mar'ie Muthohhar Rafi, dkk (2022), Masrullah, dkk. (2018), Ni Putu Novi Astari, dkk (2019), Ikhsan Abdullah (2020), Muhammad Taufik dan Muliana (2021), Dian Puspitasari, dkk. (2022), dan Vianty Adella Santo dan Cipbarani Dwi Nastiti (2023) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*****Gambar 2.3****Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***



### 2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H1:** *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

**H2:** Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

**H3:** *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.